KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Jurnal Sains Student Research Vol.3, No.6 Desember 2025

e-ISSN: 3025-9851; p-ISSN: 3025-986X, Hal 663-676

DOI: https://doi.org/10.61722/jssr.v3i6.6788



Peran BAZNAS Kabupaten Purbalingga Dalam Mengurangi Kemiskinan Perspektif Sustainable Development Goals (Goal 1: No Poverty)

Bagas Novi Ardhani

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Maruf Hidayat

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Alamat: Jl. A. Yani No.54, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127

Korespondensi penulis: bagasardhani 13 @gmail.com, marufhidayat @uinsaizu.ac.id

Abstrak. This study aims to analyze the implementation of BAZNAS Purbalingga programs and assess their relevance to the indicators of SDG Goal 1. This research uses a qualitative descriptive method. The results show that program implementation involves application, assessment, approval, disbursement, and evaluation, though challenges remain, such as mustahik dependency and limited data. From the SDGs perspective, BAZNAS contributes through consumptive programs (basic needs, health) and productive programs (business capital), which align with several Goal 1 indicators. However, its role is not yet optimal, requiring strategy reinforcement and stronger cross-sectoral synergy.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam menanggulangi kemiskinan serta mengkaji relevansinya terhadap indikator capaian SDGs Goal 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BAZNAS Purbalingga berjalan melalui alur pengajuan, asesmen, persetujuan, pencairan, dan evaluasi, meskipun masih menghadapi kendala seperti mentalitas mustahik dan keterbatasan data. Dalam perspektif SDGs Goal 1, BAZNAS berkontribusi melalui program konsumtif (bantuan sembako, kesehatan) dan produktif (modal usaha), yang selaras dengan beberapa indikator, meskipun belum menjangkau secara menyeluruh. Oleh karena itu, peran BAZNAS dapat dikatakan signifikan namun masih memerlukan penguatan strategi dan sinergi lintas sektor untuk mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Peran, Implementasi, BAZNAS, SDGs

Keywords: Poverty, Role, Implementation, BAZNAS, SDGs.

PENDAHULUAN

Kemiksinan masih menjadi persoalan global yang komplek dan berkelanjutan, termasuk di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar (Nugraha et al., 2025; Pulungan & Haryanto, 2024). Di Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Purbalingga menunjukkan kinejra positif dalam menurunkan angka kemiskinan dari 16,24% pada tahun 2021 menjadi 14,18% pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024). Namun capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan perbaikan kesejahteraan secara substansif. Dalam kontek pembangunan berkelanjutan, penghapusan kemiskinan merupakan tujuan pertama dari agenda global yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menekankan pentingnya kolaborasi tingkat sektor termasuk lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat, sebagai instrumen distribusi ekonomi Islam, memiliki fungsi sosial yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran dana konsumtif dan produktif (Dayu et al., 2023). Sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Purbalingga berperan penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kurangnya kajian yang mengaitkan

antara program BAZNAS dengan indikator capaian SDGs menjadi hal yang mendasari penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam mengurangi kemiskinan serta menilai relevansinya terhadap indikator-indikator capaian SDGs khususnya pada *Goal* yang pertama, *No Poverty*.

KAJIAN TEORITIS

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global pembangunan berkelanjutan yang diikuti dan dilaksanakan oleh banyak negara terutama Indonesia. SDGs sendiri dideklarasikan sejak 2015 dengan 17 tujuan utama (Goals), salah satunya No Poverty (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023). Goal ini menekankan penghapusan kemiskinan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses layanan dasar. SDGs bersifat kolaboratif dan inklusif, sehingga peran lembaga sosial keagamaan seperti BAZNAS menjadi penting dalam mendukung pencapaiannya melalui program zakat (Zaenal et al., 2025).

Konsep *Maqashid Syariah* menjadi landasan spiritual dan etis bagi pengelolaan zakat. Lima tujuan utamanya yakni (a) Menjaga Agama (*hifdz ad-Din*); (b) Menjaga Jiwa (*hifdz an-Nafs*); (c) Menjaga Intelektual/ Akal (*hifdz al-aql*); (d) Menjaga Keturunan (*hifdz an-Nasl*); dan (e) Menjaga Harta (*hifdz al-Maal*) (Paryadi, 2021). BAZNAS menerapkan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam penyaluran zakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagi instrumen religisu, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mencapai tujuan pembanguan berkelanjutan, khususnya pengentasan kemiskinan (Hudaifah et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Purbalingga yang kemudian dikaitkan dengan indikator capaian pada SDGs khususnya *Goal* 1: *No Poverty*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan program BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan teori implementasi kebijakan publik. Implementasi disini meliputi 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan & evaluasi (Jumroh & Pratama, 2021).

1. Perencanaan

BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan, menyelenggarakan Rapat Kerja Anggaran Tahunan. Penyelenggaraan RKAT ini dimaksudkan untuk merencanakan dan sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap agenda untuk satu tahun periode ke depan. Acuan tersebut tertuju pada strategi untuk penghimpunan dan pentasyarufan dana ZIS. Dalam pentasyarufan dana zakat, setiap OPZ akan selalu mengacu pada 8 asnaf sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, pada saat ini terutama di negara Indonesia, asnaf riqob dianggap tidak ada, sehingga saat ini hanya tersisa 7 asnaf saja. Pada tahun 2024, BAZNAS Kabupaten Purbalingga mentasyarufkan dana zakat untuk 7 asnaf dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Penyaluran Dana Zakat berdasarkan Asnaf tahun 2024

Asnaf	Jumlah
Fakir	Rp941.871.067
Miskin	Rp1.783.201.677
Amil	Rp542.944.507
Muallaf	Rp17.852.500
Gharim	Rp5.000.000
Fii Sabilillah	Rp858.282.047
Ibnu Sabil	Rp1.800.000
Total	Rp4.150.951.798

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Purbalingga, 2024

Data menunjukkan bahwa fakir dan miskin merupakan penerima dengan kuota terbesar dalam penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan menjadi fokus utama dalam merencanakan program penyaluran yang akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan program, terbagi menjadi 4 alur, yakni a. pengajuan; b. Asesmen dan survei; c. Persetujuan; d. Pencairan. Diawali dengan proses pengajuan bantuan oleh mustahik. Calon penerima bantuan diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen seperti identitas diri, Surat Keterangan Tidak Mampu, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang menunjukkan status kemiskinan. Selanjutnya proses asesmen dan survei, yakni surat permohonan bantuan yang sudah dibuat berdasarkan pengajuan dan kelengkapan berkas, diserahkan kepada pimpinan dan kemudian disposisi kepada dewan pelaksana untuk selanjutnya dilaksanakan prosesi asesmen dan survei lapangan dengan memverifikasi data serta memberikan penilaian kelayakan yang nantinya akan melewati proses persetujuan yang pada rapat internal bersama dengan dewan pimpinan. Apabila disetujui, maka pimpinan menerbitkan surat keputusan untuk pencairan. Bantuan disalurkan baik dalam bentuk uang tunai maupun barang sesuai dengan jenis program yang diajukan.

3. Pengawasan dan Evaluasi

BAZNAS Kabupaten Purbalingga menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pada program pemberdayaan mustahik, khususnya bantuan modal usaha, dilakukan pengawasan setiap 10 bulan sekali guna menilai perkembangan usaha milik mustahik. Jika usaha menunjukkan peningkatan, mustahik dapat mengajukan bantuan lanjutan hingga tiga kali dengan nominal bervariasi sesuai skala usaha. Selain modal, BAZNAS juga memberikan kaleng infaq sebagai bentuk pembinaan spiritual agar mustahik terbiasa memberi meskipun bersifat sukarela. Evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan dana; mustahik yang menggunakan dana secara konsumtif cenderung tidak mendapat bantuan lanjutan. Tantangan utama dalam pelaksanaan program adalah mentalitas mustahik yang masih bergantung pada bantuan, meskipun sudah menerima program lain dari pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam memverifikasi data agar bantuan lebih tepat sasaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program BAZNAS memberikan dampak positif dengan meningkatkan pendapatan mustahik dari sekitar Rp2.000.000 menjadi Rp2.500.000-Rp3.000.000 per bulan, meskipun manfaatnya masih terbatas dan bersifat jangka pendek. Secara keseluruhan, implementasi program penanggulangan kemiskinan oleh BAZNAS berjalan cukup baik, terbukti dari distribusi dana zakat yang signifikan kepada asnaf miskin (43%) dan fakir (23%), dengan pembagian program konsumtif dan produktif yang keduanya berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, meskipun dampak jangka panjangnya perlu diperkuat melalui strategi pemberdayaan yang lebih berkelanjutan dan sinergi lintas sektor.

4. Relevansi Program BAZNAS Kabupaten Purbalingga terhadap pencapaian SDGs Goal 1: No Poverty

BAZNAS Kabupaten Purbalingga sebagai lembaga pemerintah nonstruktural memiliki mandat penting dalam mengelola ZIS untuk kepentingan umat. BAZNAS memiliki peran yang strategis dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Masriqh & Suyuti, 2025). Peran tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan agenda global yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada *Goal 1: No Poverty* (Tanpa Kemiskinan), yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem dan berkurangnya angka kemiskinan dalam semua dimensinya pada tahun 2030 (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Dalam kerangka SDGs pada Goal 1, terdapat sejumlah indikator yang menjadi ukuran tercapainya target SDGs (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappanes, 2023). BAZNAS sendiri telah memetakan sejumlah indikator dalam masing-masing target SDGs yang dapat dikaitkan dengan program BAZNAS sehingga dapat tergambarkan peranannya dalam mewujudkan SDGs (PUSKAS BAZNAS, 2017). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Purbalingga yang meliputi dewan pimpinan dan dewan pelaksana, menunjukkan bahwa lembaga ini belum sepenuhnya mengetahui agenda SDGs. Pengetahuan mengenai agenda global ini hanya dimiliki secara terbatas oleh ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga, sementara sebagian besar pengurus tidak mengetahui secara mendalam mengenai subsatansi maupun indikator pencapaian SDGs. Hal ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Purbalingga tidak secara eksplisit merancang programnya berdasarkan kerangka SDGs.

Kendati demikian, upaya BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam mendukung pencapaian SDGs berdasarkan hasil analisis peneliti dalam mengintegrasikan antara indikator capaian SDGs dengan program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Program BAZNAS yang mendukung capaian SDGs

Target	Indikator	Jenis	Bentuk Program	Impact terhadap
		Program		pencapaian SDGs
1.1	1.1.1 Tingkat	Konsumtif	Bantuan Sembako	Dapat mengurangi
Pada tahun 2030,	kemiskinan ekstrem		Rutin	persentase jumlah
mengentaskan	berdasarkan			penduduk dengan
kemiskinan	indikator global			pengeluaran < 2,15
ekstrem bagi				USD PPP
semua orang		Produktif	Bantuan Modal	Dapat mengurangi
yang saat ini			Usaha, Pelatihan	persentase jumlah
berpendapatan			Skill UMKM	pekerja dengan
kurang dari 2,15				konsumsi per kapita <
dolar Amerika				2,15 USD PPP
pada PPP				
(Purchasing				

Power Parity) 2017.

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Konsumtif	Bantuan Sembako Rutin	Dapat mengurangi persentase jumlah penduduk dengan pengeluaran < 2,15 USD PPP
		Produktif	Bantuan Modal Usaha, Pelatihan Skill UMKM	Dapat mengurangi persentase jumlah pekerja dengan konsumsi per kapita < 2,15 USD PPP
kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.2 Persentase laki- laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Konsumtif	Dimensi Kesehatan: Bantuan Sembako Rutin, Bantuan Susu Dimensi Pendidikan: Bantuan Biaya Pendidikan Dimensi Standar Hidup: RTLH, Jambanisasi, Bantuan Air Bersih, Bantuan Kasuistik (Bantuan sesuai kasus yang menimpa mustahik. Contoh: Bantuan untuk biaya listrik)	Dimensi Kesehatan: Dapat mengurangi persentase jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal; Dimensi Pendidikan: Dapat mengurangi persentase jumlah penduduk yang tidak tamat SMP atau belum bersekolah Dimensi Standar Hidup: Dapat mengurangi persentase rumah tangga yang sumber penerangannya bukan listrik; Dapat mengurangi rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum bersih; Dapat mengurangi persentase jumlah rumah tangga yang tidak memiliki WC layak; Dapat

				mengurangi persentase jumlah rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah per kapita kurang dari 8m²
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin	1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Konsumtif	Bantuan Sembako, Bantuan Susu, Bantuan Kebencanaan (BAZNAS Tanggap Bencana)	Meningkatkan proporsi rumah tangga miskin dan rentan penerima sembako; meningkatkar proporsi balita dan atau murid kelas 1-2 SD/sederajat penerima PMT (Pemberian Makanan Tambahan); meningkatkan jumlah bantuan kepada korban bencana yang terdampak
dan rentan.	1.3.1(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	-	-	-
	1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	-	-	-
	1.3.1(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 1.3.1(d) Jumlah rumah tangga yang	Konsumtif	Bantuan Kesehatan Kasuistik (Contoh: Bantuan kursi roda, Bantuan kaki palsu, Bantuan alat bantu dengar, dll.)	Meningkatkan persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
	mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.			

1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan,	1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Konsumtif	Program RTLH (termasuk akses air minum bersih, sanitasi/jambanisasi)	Dapat meningkatkan persentase indikator pada masing-masing dimensi
khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan	1.4.1(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses melahirkannya terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Konsumtif	Bantuan Layanan Ambulans Gratis	Dengan adanya bantuan ini, dapat membantu akses untuk penduduk perempuan yang dikategorikan miskin agar dapat melahirkan di fasilitas kesehatan, sehingga dapat meningkatkan persentase pada indikator SDGs tersebut.
tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru,	1.4.1(b) Persentase anak umur 12–23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	-	-	-
dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15–49 tahun yang berstatus kawin.	-	-	-
	1.4.1(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Konsumtif	RTLH, Bantuan Air Bersih (Bantuan Sumur Bor)	Dapat meningkatkan persentase pada indikator tersebut
	1.4.1(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Konsumtif	RTLH (meliputi bantuan bedah rumah dan jambanisasi)	Dapat meningkatkan persentase pada indikator tersebut

1.4.1(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Konsumtif	RTLH (meliputi bantuan bedah rumah dan jambanisasi)	Dapat meningkatkan persentase pada indikator tersebut
1.4.1(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Konsumtif	Bantuan biaya pendidikan, beasiswa	Dengan adanya bantuan pendidikan, dapat mengurangi angka putus sekolah pada tingkat SD/MI/sederajat, sehingga dapat meningkatkan persentase target APM pada jenjang pendidikan sesuai indikator
1.4.1(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Konsumtif	Bantuan biaya pendidikan, beasiswa	Dengan adanya bantuan pendidikan, dapat mengurangi angka putus sekolah pada tingkat SMP/MTs/sederajat, sehingga dapat meningkatkan persentase target APM pada jenjang pendidikan sesuai indikator
1.4.1(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Konsumtif	Bantuan biaya pendidikan, beasiswa	Dengan adanya bantuan pendidikan, dapat mengurangi angka putus sekolah pada tingkat SMA/MA/sederajat, sehingga dapat meningkatkan persentase target APM pada jenjang pendidikan sesuai indikator
1.4.1(j) Persentase penduduk umur 0–17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	-	-	-

	1.4.1(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	Konsumtif	RTLH (termasuk pemasangan listrik bagian dari rehab rumah tidak layak huni)	Dapat meningkatkan persentase pada indikator tersebut
	bukan dari PLN. 1.4.2 Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	-	-	-
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 1.5.1(a) Jumlah lokasi penguatan	Konsumtif	Program Kebencanaan (BAZNAS Tanggap Bencana)	Dengan adanya program BAZNAS Tanggap Bencana, dapat meminimalisir jumlah korban terdampak bencana
kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	pengurangan risiko bencana. 1.5.1(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Konsumtif	Program Kebencanaan (termasuk pembuatan dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan pangan dasar dan area pengungsian bagi	Dapat meningkatkan persentase pada indikator tersebut
	1.5.1(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	-	korban bencana terdampak)	-

1.5.1	(d) Jumlah	-	-	-
daera	ah bencana			
alam	/bencana sosial			
yang	g mendapat			
pend	lidikan			
kebe	ncanaan.			
1.5.1	(e) Indeks	-	-	-
risik	o bencana pada			
pusa	t-pusat			
pertu	ımbuhan yang			
beris	siko tinggi.			
1.5.2	2 Jumlah	-	-	-
keru	gian ekonomi			
langs	sung akibat			
benc	ana terhadap			
GDP	global.			
1.5.2	2(a) Jumlah	-	-	-
keru	gian ekonomi			
lang	sung akibat			
benc	ana.			
1.5.3	8* Rencana dan	-	-	-
impl	ementasi strategi			
nasio	onal			
peng	gurangan risiko			
benc	ana yang selaras			
deng	gan the Sendai			
Fran	nework for			
Disa	ster Risk			
Redu	uction 2015–			
2030)			
1.5.4	1* Persentase	-	-	-
peme	erintah daerah			
yang	g mengadopsi			
	menerapkan			
	egi pengurangan			
risik	o bencana			
daera	ah yang selaras			
deng	gan strategi			
peng	gurangan risiko			
benc	ana nasional.			

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pemetaan program BAZNAS Kabupaten Purbalingga terhadap indikator pencapaian SDGs Goal 1, dapat disimpulkan bahwa program BAZNAS memiliki

kontribusi nyata, meskipun belum menyeluruh pada semua indikator yang ditetapkan dalam agenda global tersebut.

Pertama, pada Target 1.1 dan 1.2, dapat dilihat bahwa program konsumtif seperti bantuan sembako rutin serta program produktif seperti bantuan modal usaha dan pelatihan UMKM telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan, baik dari sisi konsumsi maupun peningkatan pendapatan. Namun demikian, sifat bantuan konsumtif cenderung hanya memberikan dampak jangka pendek, sementara program produktif lebih berpotensi memberikan dampak berkelanjutan meski membutuhkan pendampingan insentif.

Kedua, pada Target 1.3, BAZNAS melalui program bantuan sembako, susu, serta respon kebencanaan mampu meningkatkan akses kelompok miskin dan rentan terhadap perlindungan dasar. Bahkan terdapat program spesifik bagi penyandang disabilitas berupa bantuan alat kesehatan (kursi roda, kaki palsu, dan lain-lain) yang relevan dengan indikator inklusivitas. Meski demikian, keterkaitan BAZNAS dengan skema jaminan sosial nasional (SJSN) dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih minim, menunjukkan adanya ruang koordinasi yang perlu diperkuat dengan pemerintah daerah maupun pusat.

Ketiga, pada Target 1.4, kontribusi BAZNAS Kabupaten Purbalingga terlihat jelas melalui program RTLH, Jambanisasi, bantuan sumur bor, bantuan biaya pendidikan, hingga layanan ambulans gratis. Program-program ini secara langsung bersinggungan dengan indikator akses air minum layak, sanitasi, pendidikan, hingga persalinan di fasilitas kesehatan. Namun, beberapa indikator seperti kepemilikan akta kelahiran, hak atas tanah belum tersentuh secara signifikan.

Keempat, pada Target 1.5, BAZNAS Kabupaten Purbalingga berperan melalui program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana serta dapur umum. Program ini relevan dengan indikator pemeuhan kebutuhan dasar korban bencana. Namun, keterlibatan BAZNAS dalam pengurangan risiko bencana secara preventif, pendidikan kebencanaan, maupun strategi adaptasi jangka panjang masih belum terlihat.

Dari analisis keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Purbalingga secara tidak langsung berperan dalam mendukung pencapaian SDGs khususnya pada Goal 1 dan masih bersifat parsial serta lebih dominan pada aspek bantuan konsumtif serta layanan dasar. Program produktif yang ada telah menunjukkan potensi signifikan, namun masih terbatas dalam cakupan. Oleh karena itu, peran BAZNAS Kabupaten Purbalingga dapat dikategorikan sudah kontributif namun belum optima, terutama dalam menjangkau indikator yang bersifat struktural seperti perlindungan sosial formal, akses tanah, dan strategi pengurangan risiko bencana.

KESIMPULAN

Implementasi program BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam upaya pengentasan kemiskinan telah berjalan sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi dengan mencakup bantuan produktif dan konsumtif. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan seperti mentalitas mustahik yang bergantung pada bantuan dan keterbatasan dana yang membatasi jangkauan penerima manfaat. Selanjutnya, secara substansial, berbagai program BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah sejalan dengan indikator-indikator dalam SDGs *Goal 1: No Poverty,* seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta ketahanan terhadap bencana melalui program BAZNAS Tanggap Bencana. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan

penghapusan kemiskinan di tingkat daerah menurut perspektif SDGs meskipun kontribusinya masih belum bisa dikatakan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat. Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman, 13(1), 121–131. hxttps://doi.org/https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1
- Al Gaza, M. H., Ridwansyah, & Malik, A. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals Provinsi Lampung Tahun 2018-2023 (Studi Pada Provinsi Lampung). Neraca, 2(12), 99–113. https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/2927
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi*. Bandung: UNPAD Press. https://doi.org/10.18356/9789210010788
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2024*. https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxK
- Daeroby, A., & Mawardi, I. (2024). Menakar Peran Baznas Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals Pada Sektor Ekonomi Ahmad Daeroby, JIEF-Journal of Islamic Economics and Finance, 4(1), 2024. https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jief.v4i1.6976
- Dayu, W., Anggara, W., & Harahap, I. (2023). Dinamika Produksi Dalam Makroekonomi Islam: Analisis Terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Dan Implikasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 244–262. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v8i2.16975
- Dewi, N., Hilyatin, D. L., Hadi, R., Hidayat, M., & Riyadi, S. (2024). Hilyatin, Dewi Effectiveness of Productive Zakat Utilization in Improving the Mustahik Economy Through Business Programs Group Assisted by Baznas Banyumas (Case Study of Business Groups Assisted by Patikraja District). Proceeding of The 3rd International Conference on Finance Business and Banking, 1–9.
- Hasibuan, R., & Dwi Retno Widiyanti. (2024). Peran Baznas Indonesia Dalam Upaya Mendukung Program Sdgs (Study Case: Poin 1 No Poverty Dan 4 Quality Education Di Indonesia). Islamic Economics and Finance in Focus (IEFF), 3(2), 336–352. https://doi.org/10.21776/ieff.2024.03.02.09
- Hudaifah, A., Tutoko, B., Abdurrubi, S., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589
- Jetlikhsan, D., & Boedirochminarni, A. (2024). Sustainable Development Goals: Analysis Factors No Poverty in Java. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 18(1), 127–137. https://doi.org/10.32815/jibeka.v18i1.1986
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik. In *Insan Cendekia Mandiri*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappanes. (2023). METADATA INDIKATOR EDISI II TAHUN 2023: PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) (2nd ed.). Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona.

- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030*. Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. file:///D:/banjar/Road-Map-SDGs-2023-2030-smll.pdf
- Masriqh, A. A., & Suyuti, M. H. (2025). Efektivitas Program Baznas dalam Pengetasan Kemiskinan di Purbalingga. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan Teknologi*, 2(2), 312–317. https://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/view/236
- Maulana, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 220–229. https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142
- Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam. Journal of Business Finance and Economic (JBFE), 5(2). https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754
- Nasution, M. P. R., Erwanda, F., Syaifullah, F., Erdiansyah, Mayasari, F., & Wismanto. (2025). Islam Sebagai Pedoman Menghadapi Perubahan Dalam Hidup. Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, 2(1), 62–72. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.367
- Ningsih, O., & Hadi, R. (2022). Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga). Social Science Studies, 2(3), 258–273. https://doi.org/10.47153/sss23.3912022
- Novarianti, S., Suyuti, M. H., Uin, D., & Purwokerto, S. (2025). Strategi Ketepatan Penyaluran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Baznas Purbalingga. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(7), 23–26. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14899289 Strategi
- Nugraha, G., Rahayu, D. S., & Sukarso, A. (2025). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*), 9(1), 1287–1303. https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5166
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Pulungan, M. A., & Haryanto, T. (2024). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Sektor Informal Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(1), 2244–2262.
- Purwitasari, A., Yuliani, & Mutafarida, B. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan UMKM Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 2(6), 667–677.
- PUSKAS BAZNAS. (2017). Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goal untuk Pencapaian Maqashid Syariah. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). www.baznas.go.id
- Ridwan, R., Putra, R. A., & Khairi, P. M. (2023). Zakat Sebagai Instrumen Fiskal. Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 12(1), 110–118. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36272/jes.v12i1.281.
- Rindjani, S. F., & Hadi, R. (2022). The Utilization Optimizing of Productive Zakat inImplementation Sustainable Development Goals to Improve Mustahik's Welfare. Social Science Studies, 2(5), 368–386.
- Syaripudin, E. I., & Nuraeni, I. (2022). Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut. Jurnal Hukum Ekonomi

- Syariah (JHESY), 01(01), 3. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.247
- Utama, R. P. (2021). Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan Sustainanble Development Goals Di Indonesia. Kutubkhanah, 21(2), 45–58. https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i2.15639
- Zaenal, M. H., Hartono, N., Herlin, Nur, A., Hayana, I. H., Farchatunnisa, H., Burhanudin, S. M., & Pridayani, R. N. (2025). *Rencana Aksi SDGS 2025-2030 Sektor Pengelola Zakat*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).